

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Politik anggaran di Kementerian Pertahanan pada era Presiden Prabowo Subianto (2024-2025) mencerminkan sebuah transformasi strategis yang mengedepankan efisiensi serta efektivitas dalam modernisasi alutsista TNI Angkatan Udara. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada akuisisi platform tempur canggih seperti jet Rafale, namun juga menyentuh penguatan sistem sensor dan radar melalui *Integrated Air Defence System (IAADS)* yang lebih komprehensif. Langkah tersebut diambil sebagai respons taktis terhadap dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang kian memanas, terutama di wilayah sengketa Laut Cina Selatan yang menuntut kesiapsiagaan tinggi. Perencanaan anggaran yang matang menjadi faktor penentu agar setiap alokasi dana mampu menghasilkan daya gentar yang maksimal guna melindungi kedaulatan wilayah yurisdiksi nasional

Transisi paradigma dari *Minimum Essential Force (MEF)* menuju *Optimum Essential Force (OEF)* menjadi jiwa dari rekonstruksi pengambilan keputusan anggaran pertahanan saat ini. Pemerintah bersama legislatif telah bersepakat bahwa pertahanan udara Indonesia tidak boleh lagi hanya berpijak pada standar kebutuhan minimal, melainkan harus bergerak menuju kekuatan yang optimal dan memadai untuk menangkal ancaman hibrida. Fokus utama dari transisi ini adalah penguatan kemandirian industri pertahanan melalui skema transfer teknologi yang wajib dan program *offset* yang lebih agresif. Melalui kebijakan ini, Indonesia berupaya meminimalisir ketergantungan logistik pada negara donor sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi domestik melalui penguasaan teknologi kedirgantaraan yang bernilai tambah tinggi bagi bangsa.

Dampak strategis kebijakan fiskal juga diarahkan untuk menjamin sustainabilitas kesiapsiagaan tempur melalui alokasi dana yang seimbang antara belanja modal dan belanja operasional. Kesiapan militer yang berkelanjutan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran rutin untuk pemeliharaan alutsista modern, jam terbang personel, serta peningkatan fasilitas pangkalan udara yang memadai. Penempatan alutsista kini diupayakan lebih merata ke wilayah terluar guna mempendek waktu reaksi terhadap gangguan kedaulatan di perbatasan, sehingga

pertahanan tidak lagi bersifat Jawa-sentris (Sianipar, Saputro, & Sundari, 2024). Kebijakan fiskal yang disiplin dan transparan dalam pengelolaan siklus hidup alutsista ini menjadi kunci agar kekuatan TNI AU tetap terjaga dalam kondisi prima selama puluhan tahun masa pakainya.

Pemanfaatan teknologi masa depan seperti pesawat nirawak (UAV) dan sistem peperangan elektronika juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi efisiensi anggaran dalam postur OEF. Penggunaan UAV memberikan solusi ekonomis untuk patroli wilayah yang luas tanpa harus menguras anggaran operasional pesawat tempur berawak secara berlebihan setiap harinya. Rekonstruksi anggaran ini membuktikan bahwa Indonesia mulai mengadopsi taktik peperangan modern yang mengandalkan keunggulan informasi dan integrasi antar-matra yang solid. Kesuksesan integrasi sistem ini akan memberikan pengakuan internasional terhadap kapabilitas TNI AU, sebagaimana terlihat dalam partisipasi latihan gabungan berskala besar dengan negara-negara maju di kawasan (Hudori, Arifin, Apdilla, & Sujana, 2025).

Secara menyeluruh, penelitian ini menyimpulkan bahwa arah kebijakan pertahanan udara Indonesia saat ini telah berada pada jalur yang benar untuk menjadi kekuatan udara yang tangguh dan disegani. Sinergi yang kuat antara visi kepemimpinan di Kementerian Pertahanan, dukungan politik dari DPR RI, serta profesionalisme prajurit di lapangan menjadi pilar penyokong keberhasilan modernisasi ini. Jika konsistensi politik dan anggaran dapat dipertahankan, Indonesia berpotensi besar untuk menempati jajaran 15 besar kekuatan udara dunia dalam waktu dekat. Capaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan jaminan bagi terciptanya langit Nusantara yang aman dan damai, sekaligus menjadi fondasi utama bagi pencapaian visi kedaulatan nasional dalam menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045.

5.2 SARAN

Kementerian Pertahanan diharapkan mampu mempercepat reformasi birokrasi pada proses pengadaan alutsista untuk mengatasi hambatan struktural yang masih sering muncul. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proses pengadaan memakan waktu cukup lama, diperlukan penguatan sistem digitalisasi tender atau penerapan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat siklus tender hingga 50%. Langkah strategis ini sangat penting agar alutsista yang dipesan, termasuk pesawat tempur Rafale dan unit drone ANKA-S, tetap sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru saat dioperasikan oleh TNI AU, sehingga risiko ketertinggalan teknologi dapat diminimalkan.

Pemerintah harus menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan (R&D) lokal serta mengoptimalkan skema offset industri pertahanan dalam kisaran 35-40%. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kerjasama transfer teknologi (ToT) dengan mitra internasional. Dengan meningkatkan kemandirian industri pertahanan lokal dan memastikan dukungan pemeliharaan suku cadang yang berkelanjutan, diharapkan kesiapan operasional alutsista strategis dapat dipertahankan secara mandiri untuk memperkuat postur pertahanan negara di tingkat regional.

Peningkatan mekanisme pengawasan pengelolaan anggaran menjadi hal yang sangat penting agar setiap upaya efisiensi dapat diarahkan dengan baik pada program modernisasi. Kementerian Pertahanan disarankan untuk mengadopsi sistem pengawasan digital yang transparan dan akuntabel, guna mengurangi risiko penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Melalui kerjasama pengawasan yang lebih ketat antara internal kementerian, lembaga audit, dan legislatif, diharapkan kebijakan politik anggaran tetap konsisten dalam mendukung pencapaian kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force) demi menjaga kedaulatan wilayah udara nasional secara utuh.